

IMPLEMENTASI RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG SESUAI PEMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014 KABUPATEN ACEH BARAT

Fanny Nur Annisah, Safrida
Fakultas FISIP, Universitas Teuku Umar, Indonesia
Email: FannynurAnnisah@gmail.com

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana mengevaluasi rencana pembangunan tahunan gampong dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan serta merumuskan program Rencana Kerja Pemerintah Gampong selama 1(satu) tahun. Masalah difokuskan pada kendala yang terjadi pada saat penyusunan kegiatan rencana kerja pemerintah gampong oleh instansi DPMG dan aparatur gampong. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan metode kualitatif secara deskriptif. Data-data dikumpulkan melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan rencana kerja pemerintah gampong sesuai PEMENDAGRI no 114 Tahun 2014 bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Kemudian menganalisis proses pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan gampong secara maksimal dan dengan mudah diidentifikasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no 114 tahun 2014.

Kata Kunci: Implementasi, RKPG, PEMENDAGRI No 114 Tahun 2014

Abstract

This article aims to understand how to evaluate the gampong annual development plan in formulating development strategies and policies as well as formulating the Gampong Government Work Plan program for 1 (one) year. The problem is focused on the obstacles that occur during the preparation of the work plan activities of the gampong government by the DPMG agency and the gampong apparatus. In order to approach this problem, a descriptive qualitative method is used as a reference. The data were collected through Interview, Observation, Documentation. This study concludes that in carrying out the work plan activities of the gampong government in accordance with the Ministry of Home Affairs No. 114 of 2014 that in order to achieve national development priorities and targets, annual planning synergies are needed between the central government and regional governments as well as between regional governments. Then analyze the process of achieving the maximum implementation of gampong development programs/activities and are easily identified which refers to the Minister of Home Affairs Regulation No. 114 of 2014.

Keywords: Implementation, RKPG, PEMENDAGRI No. 114 of 2014

Diserahkan: 12-02-2022

Diterima: 25-02-2022

Diterbitkan: 20-03-2022

Pendahuluan

Bahwa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan Tuha Peuet Gampong dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan gampong. RKPG merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan di gampong. RKPG menjadi satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah gampong. (Kerja et al., 2018)

Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah, dengan lebih mengoptimalkan peran birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada public dan memberdayakan kekuatan masyarakat sebagai modal sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini aparatur pemerintah dan aparatur gampong dituntut untuk lebih kapabel, inovatif dan profesional dalam mendesain perencanaan dan pembangunan. (Yulison & Isril, 2014)

Implementasi adalah suatu Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah suatu perencanaan yang sudah dianggap sempurna. Dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang sudah terencana, tidak hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan ketentuan norma- norma tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Implementasi tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program, atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil sesuai yang di harapkan. (aInkiriwang, 2019)

Rencana kerja pemerintah daerah berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Istilah gampong merupakan kata lain dari pada Desa yang merupakan pembagian wilayah administratif di provinsi Aceh Indonesia. Rencana Kerja pemerintah gampong memuat kerangka ekonomi gampong, prioritas pembanguna gampong, rencana gampong mampu ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah. Rencana Kerja Pemerintah Gampong menjadi

kewajiban pemerintah daerah dalam pembinaan aparatur gampong dalam mengelolah pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Mardhiah et al., 2019)

Tujuan penyusunan RKPG secara partisipatif adalah agar gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap, Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar gampong dengan pemerintah di atasnya. Kemudian tujuan penyusunan RKPG dilakukan sebagai dasar penyusunan peraturan/Qanun gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Landasan hukum RKPG disusun mengacu pada. (1) Undang-undang nomor 7 Drt tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupate-Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara; Bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk melancarkan jalannya pemerintahan kabupaten-kabupaten otonom dimaksud, perlu segera kepada kabupaten-kabupaten otonom dimaksud diberikan dasar-dasar hukum yang tegas dan yang semestinya dengan jalan membentuk kabupaten-kabupaten otonom itu dengan undang-undang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang No 22 Tahun 1948” (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewah Aceh; Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dengan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang memerlukan adanya jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan segala urusan, perlu dibentuk undang-undang tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah Aceh (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; Bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintahan daerah perlu diatur secara adil dan selaras, Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintah (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam Sistem Negara Kesatuan Indonesia. (Pengantar, 2017)

Manfaat penyusunan RKPG adalah, agar lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat gampong, menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat pemerintah gampong beserta seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan yang akan dibiayai APBG sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan di padukan dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Untuk melakukan rencana pembangunan Gampong yang dituangkan kedalam dokumen RKPG bahwa aparat Gampong harus berperan aktif dalam proses penyusunan agar tercapainya suatu Gampong yang mandiri dan sejahtera. (Sinambela & Maifizar, 2021)

Dinas pemberdayaan masyarakat gampong adalah lembaga yang mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong. Kemudian pemerintah gampong menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada perencanaan pembangunan daerah. Dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah Aceh dibidang pemberdayaan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. (Khairani, 1375)

Adapun penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian tentang hal tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Mardhiah (2019) dengan judul “Pengendalian RKPG dan Pendampingan Pemerintah Gampong Melalui Kemitraan BAPPEDA di Kecamatan Meureubo Aceh Barat”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah Melakukan sosialisasi pendampingan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui 4 (empat) tahap yakni FGD tentang ketentuan RKPG dan RPJMG, sosialisasi mekanisme pelaksanaan MUSRENBANGDES, penerapan mekanisme sosial kontrol secara langsung oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan RKPG.

Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh B.Yulison, Isril (2014) dengan judul “Implementasi Penyusunan RKPD Kabupaten”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah ada beberapa tahapan yang belum dilakukan pemerintah kabupaten dalam penyusunan RKPD berdasarkan PEMENDAGRI Nomor 54 tahun 2010 seperti surat pembentukan tim penyusun RKPD seharusnya ditetapkan oleh surat keputusan bupati.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan berfokus pada kendala yang ada pada saat penyusunan RKPG oleh

aparatur gampong, sering ditemukan ketidak sesuaian pedoman yang telah diberikan dengan hasil penyusunan RKPG. Hal ini berdasarkan observasi yang saya lakukan selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi RKPG sesuai PEMENDAGRI No 114 Tahun 2014 dengan studi kasus pada proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Barat. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan baru pada umumnya. Dan pada khususnya dapat memberikan informasi mengenai Rencana Kerja Pemerintah Gampong. Secara praktis bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif menjadi salah satu faktor yang cukup penting dalam melaksanakan penelitian, karena pada hakikatnya metode penelitian merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan suatu penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan kata atau kalimat yang dipisah menurut masing-masing kategori untuk memperoleh kesimpulan. (Arikunto, 2003)

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang beralamat di Jl. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Waktu penelitian dilaksanakan selama jangka waktu 6 bulan terhitung dari bulan September 2021 sampai dengan Januari 2022.

Informan merupakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan kunci merupakan informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti, tidak hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar serta memahami informasi tentang informan utama. Pada penelitian ini jumlah informan yang dipilih oleh peneliti berjumlah 6 orang baik dari kepala bidang pembangunan sampai ke pegawai honorer sehingga mampu memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti. (Agus, 2015)

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (interview), dokumentasi, pengamatan (observasi), dan gabungan kegiatannya. Sugiyono(2017:194). (1) Wawancara Adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung dengan informan yang sudah ditentukan oleh peneliti yaitu para pegawai yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong. Metode wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. (2) Observasi Berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan yang prosesnya di dahului dengan melakukan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena.

Pengumpulan data yang digunakan dengan Teknik observasi dimana peneliti terlibat langsung dengan pegawai yang berada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (3) Dokumentasi Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Peneliti melakukan dokumentasi dengan mengevaluasi dari setiap jawaban-jawaban dari para informan untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat. (Moha & sudrajat, 2019)

Hasil Dan Pembahasan

Sebelum melakukan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Gampong hal yang perlu dilakukan yakni, Perumusan rancangan awal RKPG merupakan awal dari proses penyusunan rancangan RKPG untuk memberikan panduan kepada seluruh gampong yang berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.



Gambar 1. Berdiskusi dengan ibu Erlina mengenai Penyusunan RKPG

Pada Gambar 1. Dalam hal ini saudari Erlina selaku Kasi Pembangunan SAPRAS Mukim dan Gampong dan sebagai tim evaluasi RKPG di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mengatakan dalam proses penyusunan RKPG syarat utama yang harus dilakukan yakni musyawarah gampong yang terdiri dari Keuchik, Aparatur gampong, dan Tuha peut. Penyusunan RKPG ini dilakukan dalam limit waktu satu bulan terhitung dari akhir November hingga akhir Desember. Dalam Menyusun RKPG alih-alih yang bertanggung jawab dan terlibat yakni:

Tabel 1. Yang bertanggung jawab dalam penyusunan RKPG

Penyusunan RKPG	Tanggung Jawab
Keuchik	Sebagai Pembina dalam penyusunan RKPG
Sekretaris Desa	Sebagai Ketua dalam penyusunan RKPG

Kaur Keuangan	Sebagai Sekretaris dalam penyusunan RKPG
Kasi Pemerintahan	Sebagai Anggota dalam penyusunan RKPG

Sumber: Bidang Pembangunan Mukim dan Gampong

Kemudian SK sebagai Keanggotaan dalam penyusunan RKPG akan dikeluarkan oleh keuchik masing-masing gampong sebagai bukti tertulis kepada Aparatur Gampong menjadi anggota dalam penyusunan RKPG.



Gambar 2. Berdiskusi dengan ibu Dr.Aja Cut selaku Kasi Fasilitasi Penataan dan Kerja Sama Mukim dan Gampong mengenai pelaksanaan RKPG

Pada Gambar 1. Dalam Menyusun dan mengevaluasi RKPG tersebut tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh para pegawai. Seperti yang dikatakan oleh Aja Cut Kamalawati sebagai Penata Tingkat 1, bahwa Adapun kendala yang sering ditemukan dalam mengevaluasi RKPG yakni sering terjadinya ketidaksesuaian antara pedoman yang telah diberikan dengan hasil RKPG yang di susun oleh aparatur gampong oleh karena itu hal ini dapat membuat para pegawai yang mengevaluasi RKPG bekerja dua kali sehingga jangka waktu yang telah di tentukan akan menjadi semakin berlari atau melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut Aryaton sebagai pegawai di bidang pembangunan, mengatakan bahwa dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong harus memiliki usulan program yang strategis dan menjadi sasaran bagi gampong agar menjadi gampong yang mandiri dan sejahtera. Contoh nya seperti pada gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Ulee Blang memperhatikan beberapa hal mendasar, sehingga dalam melaksanakan kegiatan akan terhindar dari tumpang tindih sumber anggaran. Karena pada dasar nya suatu program kegiatan gampong di danai dari sumber dana APBK, APBA, dan APBN.

Table 1.1

Usulan Program dan Kegiatan Gampong Ulee Blang yang bersumber dari APBK

Bidang	Kegiatan	Lokasi	Target	Perkiraan Anggaran
			Volumen	Satuan

Sarana dan Prasarana	1. Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Lr. Sentosa Dusun Pahlawan	Ulee Blang	300	Meter	400.000.000,00
Ekonomi	1. Pembangunan Balee Tani	Ulee Blang	1	Unit	150.000.000,00
Sosial budaya	1. Pembangunan Pagar TPQ	Ulee Blang	1	Paket	500.000.000,00
Perempuan, anak dan disabilitas	1. Mesin Jahit	Ulee Blang	75	Unit	187.000.000,00

Dari Tabel diatas, usulan program dan kegiatan pembangunan Gampong Ulee Blang menurut Musrebang Gampong yang selanjutnya akan dibahas pada tingkat Musrebang Kecamatan, dan selanjutnya tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. APBK adalah perwujudan atau kenyataan dari rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan daerah, yang telah diwujudkan dengan proses mulai dari rencana keuangan tahunan pemerintah daerah hingga pelaksanaannya yang dijalankan oleh pemerintah daerah. (Fuadi jaya, Zakaria, 2021)

Table 1.2
Usulan Program dan Kegiatan Gampong Ulee Blang yang bersumber dari APBA

Bidang	Kegiatan	Lokasi	Target		Perkiraan Anggaran
			Volume	Satuan	
Sarana dan Prasarana	1. Rehab Lantai dan Dinding Mesjid Baitul Muttaqin	Ulee Blang	1	Paket	600.000.000,00
Ekonomi	1. Pembangunan Depot Air Minum	Ulee Blang	1	Unit	75.000.000,00
Sosial Budaya	1. Pembangunan Kantor Tuha Peut	Ulee Blang	1	Unit	250.000.000,00
Permpuan, Anak dan Disabilitas	1. Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Tempat Bermain Anak	Ulee Blang	1	Paket	200.000.000,00

Dari table diatas, usulan program dan kegiatan pembangunan gampong Ulee Blang akan diajukan ke tingkat Provinsi Aceh. APBA merupakan sesuatu yang diharapkan pemda untuk menjamin bahwa program yang sedang berjalan dapat tercapai kinerjanya seperti yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan daerah. (Asmara, 2010)

Table 1.3

Usulan Program dan Kegiatan Gampong Ulee Blang yang bersumber dari APBN

Bidang	Kegiatan	Lokasi	Target	Perkiraan Anggaran
			Volume Satuan	
Saran dan Prasarana	1. Pembangunan Jalan Baru Lingkar Gampong Tepi Sungai	Ulee Blang	1,5 Km	1.500.000.000,00
Ekonomi	1. Pengadaan Tambak Ikan Masyarakat	Ulee Blang	50 Unit	1.000.000.000,00
Sosial Budaya	1. Pembangunan Vapin Halaman Masjid dan Drainase Pembangunan Depan Masjid	Ulee Blang	1 Paket	700.000.000,00
Perempuan, Anak, dan Disabilitas	1. Pembangunan Tempat Usaha / Kos Disabilitas	Ulee Blang	5 Unit	500.000.000,00

Dari Table diatas, usulan program dan kegiatan pembangunan Gampong yang akan diajukan ke tingkat Nasional. APBN dimaksud adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh DPR, yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 (satu) tahun. (Al-Zikrillah, 2020)

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan menurut, Cut Rini selaku pegawai dan merupakan tim evaluasi RKPG, mengatakan bahwa dari bidang pembangunan telah di berikan Pedoman penyusunan RKPG yang dikirimkan kepada Kasi pemerintahan masing-masing gampong, Namun banyak dari aparatur gampong yang tidak memeriksa terlebih dahulu pedoman yang telah diberikan kepada kasi pemerintahan sehingga Ketika penyusunan RKPG dari aparatur gampong tersebut tidak sesuai dengan pedoman yang telah diberikan, Hal ini dikarenakan tidak adanya komunikasi antara kasi pemerintahan dengan aparatur gampong.

Dari kendala-kendala tersebut menurut Afiffah, mengatakan perlu adanya pelatihan terhadap aparatur gampong yang merupakan tim penyusun RKPG baik dari kecamatan maupun dari masing-masing gampong, agar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong menjadi lebih cepat dan tepat.

Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Gampong pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan Gampong dan

masyarakat untuk saling bekerjasama membangun Gampong. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di gampong. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong memiliki fungsi sebagai tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menghasilkan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPG dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi. Penyusunan RKPG berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, perubahan, pengendalian, dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan proses penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Gampong benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala Gampong menuju kemandirian Gampong. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Gampong dapat seluruhnya tergerakkan secara profesional.

Adapun faktor pendukung berjalan dengan baik suatu implementasi Rencana Kerja Pemerintah Gampong yakni dengan cara melakukan sistem Online RKPG, hal ini dilakukan agar ketika penyusunan dan pengevaluasian dapat berjalan lancar sesuai pedoman yang diberikan sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian dalam proses penyusunan. Namun bagi pihak gampong hal ini menjadi hambatan dikarenakan gampong dan aparturnya masih ada yang belum mengerti mengenai sistem online tersebut, sehingga harus dilakukan bimbingan teknologi oleh tenaga ahli yang ada.

BIBLIOGRAFI

- Agus. (2015). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, December, 14. eprints.polsri.ac.id
[Google Scholar](#)
- Al-Zikrillah. (2020). Sistem Ekonomi Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 1, 5.
[Google Scholar](#)
- Arikunto. (2003). Arikunto (1998, h.309). *Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran*, 32 [Google Scholar](#)
- Asmara, J. (2010). Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apba) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 155–172. [Google Scholar](#)
- Fuadi jaya, Zakaria, M. I. (2021). *Analisis Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) pada Sektor pendidikan di Kabupaten PIDIE JAYA*. 8848(2), 587–601. [Google Scholar](#)
- Inkiriwang, N. (2019). *Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan*. 8. 15–38. [Google Scholar](#)
- Kerja, R., Gampong, P., Kota, P., Aceh, B., & Alam, K. K. (2018). Gampong peunayong. *Rencana Kerja Pemerintah Gampong*. [Google Scholar](#)
- Mardhiah, N., Said, I., & Kabiru, A. (2019). Pengendalian RKPG dan Pendampingan Pemerintah Gampong Melalui Kemitraan BAPPEDA di Kecamatan Meurebo , Aceh Barat Pemerintahan Desa merupakan yang memicu meningkatnya jumlah Naskah Peraturan pemerintah dalam mewujudkan perencanaan Undang-Undang peraturan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 108–116. [Google Scholar](#)
- Moha, I., & sudrajat, D. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wtn cz> [Google Scholar](#)
- Pengantar, K. (2017). *Gampong peunayong*. [Google Scholar](#)
- Sinambela, S., & Maifizar, A. (2021). Sosialisasi Fungsi Tuha Peut dalam Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Gampong Ujong Drien. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 2(2), 297. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v2i2.2971> [Google Scholar](#)
- Yulison, B., & Isril. (2014). Implementasi Penyusunan Rkpd Kabupaten. *Administrasi Pembangunan*, 2(3), 227–360. [Google Scholar](#)

First publication right:
[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

